



Komunikasi Sistem Pemerintah dan Masyarakat di Media Lokal dalam Isu Penanggulangan Banjir di Kota Sungai Penuh

Ahmad Khairul Nuzuli^{1*}

¹ Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Sungai Penuh, Jambi, Indonesia

*Corresponding Author, Email: ahmadkhairulnuzuli@iainkerinci.ac.id

ABSTRACT

Keywords:

Ecological
Communication,
Development
Communication,
Social System
Resonance,
Flood
Management

This study explores the resonance between the government and the community regarding flood management in Sungai Penuh City using Teun A. Van Dijk's discourse analysis approach and Niklas Luhmann's resonance theory. The findings indicate an imbalance in resonance between citizens and the government. The community shows a resonance of "too much" with emotional, participatory, and repetitive responses through cooperation, criticism, and independent action, while the government shows a resonance of "too little" with consistent bureaucratic communication patterns, but low emotional intensity. This imbalance indicates that both systems function according to their own internal communication codes, but a balanced resonance that can produce sustainable collective solutions has not yet been created. This finding reinforces Luhmann's argument that interactions between social subsystems are unbalanced and that dominance has the potential to hinder the development of discourse on a social issue

ABSTRAK

Kata kunci:

Komunikasi
Ekologi,
Komunikasi
Pembangunan,
Resonansi
Sistem Sosial,
Penanggulangan
Banjir

Penelitian ini mengeksplorasi resonansi antara pemerintah dan masyarakat terkait penanggulangan banjir di Kota Sungai Penuh dengan menggunakan pendekatan analisis wacana Teun A. Van Dijk dan teori resonansi Niklas Luhmann. Temuan studi mengindikasikan adanya ketidakseimbangan resonansi antara warga dan pemerintah. Masyarakat menunjukkan resonansi "to much" dengan respons emosional, partisipatif, dan berulang melalui kerja sama, kritik, hingga aksi mandiri, sementara pemerintah memperlihatkan resonansi "to little" dengan pola komunikasi birokratis yang konsisten, namun rendah intensitas emosional. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa kedua sistem berfungsi sesuai dengan kode komunikasi internal mereka sendiri, namun belum tercipta resonansi seimbang yang dapat menghasilkan solusi kolektif yang berkelanjutan. Penemuan ini memperkuat argumen Luhmann bahwa interaksi antara subsistem sosial adalah tidak seimbang dan adanya dominasi berpotensi menghambat perkembangan wacana dalam sebuah isu sosial.

Pendahuluan

Berdasarkan analisis resiko bencana yang dikeluarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sungai Penuh, Banjir merupakan bencana yang tiap tahun di alami oleh Kota Sungai Penuh (BPBD Kota Sungai Penuh, 2022). Bahkan banjir terparah dialami oleh Kota Sungai Penuh sepanjang Tahun 2023 hingga 2024. Banjir ini menggenang Kecamatan Hampanan Rawang, Tanah Kampung dan Koto Baru, menenggelamkan 5000 hektar lahan pertanian, pemukiman, dan akses jalan masyarakat (Riskyani et al., 2025).

Tingkat curah hujan yang tinggi dan tipe topografi Kota Sungai Penuh yang cekungan rendah disepanjang Sungai Batang Merao menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir tahun (Nadira & Nur, 2024). Hasil pemetaan wilayah banjir di Kota Sungai Penuh menunjukkan hanya 34% wilayah Sungai Penuh yang bebas banjir, selebihnya berada pada kawasan resiko banjir sedang dan besar. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar kawasan kota sangat rentan terkena rendaman banjir (Yetty et al., 2018).

Dalam penanggulangan banjir tidak hanya dibutuhkan aspek teknis melainkan juga aspek sosial ekologis. Media mempunyai peran penting dalam menyebarkan informasi dalam isu penanggulangan bencana banjir kepada masyarakat (Harahap et al., 2023). Beberapa penelitian mengenai komunikasi dalam penanggulangan bencana antara lain : *Pertama*, penelitian Salley, dkk pada tahun 2025, menunjukkan pendekatan media dalam komunikasi penanggulangan banjir masih bersifat *top-down* atau satu arah seperti : intruksi resmi, arahan BPBD, liputan media, pengumuman public, dan poster (Salley et al., 2025).

Kedua, Penelitian Hayati, dkk pada tahun 2024, menjukkan komunikasi menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dan aplikasi resmi BPBD semakin dominan menjadi wadah penyebaran infoemasi bencana banjir secara *realtime*. Penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan media sosial, akses internet, dan ponsel pintar mampu membangun kesadaran dalam isu penanggulangan bencana banjir kepada masyarakat (Hayati et al., 2024).

Ketiga, Penelitian Setiadi, dkk pada tahun 2023 yang menemukan bahwa pendekatan komunikasi partisipatif masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir semakin sering dilakukan. Temuan ini menukkan bahwa komunikasi inklusi dalam isu penanggulangan bencana banjir semakin sering dilakukan, walaupun pendekatan *top-down* tradisional belum sepenuhnya ditinggalkan (Setiadi et al., 2023).

Keempat, Penelitian Fekete dan Rhain pada tahun 2024, fokus pada tekanan yang dihadapi oleh relawan dan korban. Adapun tekanan tersebut antara lain : psikologis, misinformasi, dan tantangan terkait infrastruktur. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan alat komunikasi digital yang lebih baik dan responsive dalam penanggulangan banjir (Fekete & Rhein, 2024)

Kelima, Penelitian Lin pada tahun 2025 yang mengungkapkan bahwa komunikasi penanggulangan banjir haruslah interaktif dan melibatkan berbagai kepentingan masyarakat secara kolaboratif. Lin mengatakan komunikasi kolaboratif afektif dalam meningkatkan ersepsi efikasi sosial dan efikasi respons dalam penanggulangan banjir (Lin, 2025).

Dari kelima penelitian terdahulu ini (Fekete & Rhein, 2024; Hayati et al., 2024; Lin, 2025; Salley et al., 2025; Setiadi et al., 2023), menujuukkan bahwa komunikasi dalam isu penanggulangan bencana banjir masih bersifat teknis yang menonjolkan transmisi pesan. Tanpa melihat aspek isu lingkungan menjadi sesuatu yang kompleks. Hal sejalan dengan pandangan Niklas Luhman dalam komunikasi ekologi, yang menganggap isu lingkungan adalah sesuatu yang sangat kompleks, tidak bisa direduksi oleh sistem yang tunggal, sehingga butuh sistem sosial dalam mereduksi kompleksitas isu lingkungan ini (Roth et al., 2025; Valentinov, 2014). Masyarakat terdiri dari berbagai sistem sosial yang terdiferensiasi secara kode logika komunikasi internal. Dengan kata lain, isu lingkungan tidak otomatis menjadi masalah sosial, tetapi menjadi masalah ketika ada sistem sosial yang mengkonstruksinya sesuai dengan kode internal yang dimilikinya (Luhmann, 1989). Hanya seleksi komunikasi yang dilakukan oleh masing-masing sub sistem inilah yang bisa membantu dalam mereduksi kompleksitas isu lingkungan, khususnya isu penanggulangan bencana banjir.

Penelitian ini tidak fokus pada isu dinamika komunikasi persuasif dalam media massa, seperti teknik, strategi, dan pengaruh terhadap perilaku masyarakat (Saputra & Hidayat, 2025), namun fokus pada respon sistem sosial yang tergambarkan dalam media massa.

Luhman mengembangkan isu resonansi tentang bagaimana setiap sistem yang teriritasi tentang isu lingkungan, akan memberi respon sesuai kode internal masing-masing sistem (Luhmann, 1989). Proses respon tersebut berupa proses seleksi komunikasi internal yang dilakukannya, yakni seleksi informasi, pemahaman dan ungkapan atau ekspresi komunikasi (Luhmann, 1986). Luhman tidak tertarik pada aktor dalam komunikasi, dia hanya tertarik pada proses komunikasi dan sirkulasi informasi terkait dengan isu sosial (Moeller, 2017). Luhman menganggap komunikasilah dasar masyarakat, sistem sosial mereproduksi dirinya bukan dengan individu, tapi dengan komunikasi yang melahirkan komunikasi berikutnya (Esposito et al., 2021), termasuk dalam isu penanggulangan bencana banjir di Sungai Penuh. Sehingga kebaharuan prespektif teoritis inilah yang menjadi kebaharuan dalam penelitian mengenai komunikasi dalam isu penanggulangan bencana banjir di Kota Sungai Penuh ini.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas komunikasi dalam penanggulangan banjir, sebagian besar masih berfokus pada aspek transmisi pesan, efektivitas media, dan strategi komunikasi risiko. Studi-studi tersebut cenderung melihat komunikasi sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku, baik melalui pendekatan top-down maupun partisipatif. Namun, masih terdapat keterbatasan kajian yang melihat komunikasi sebagai proses sistemik, khususnya bagaimana isu lingkungan direduksi dan direproduksi oleh sistem sosial yang berbeda melalui logika komunikasinya masing-masing. Selain itu, penelitian terdahulu belum secara spesifik mengkaji bagaimana media lokal merepresentasikan interaksi antara sistem masyarakat dan sistem pemerintahan sebagai dua subsistem yang memiliki kapasitas resonansi yang berbeda dalam merespons isu banjir. Oleh karena itu, celah penelitian ini terletak pada upaya untuk menganalisis komunikasi penanggulangan banjir bukan sebagai proses penyampaian pesan, melainkan sebagai dinamika resonansi antar sistem sosial yang direpresentasikan dalam wacana media lokal. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, studi ini menawarkan kebaruan pada dua aspek utama. Pertama, secara teoritis, penelitian ini mengintegrasikan analisis wacana Teun A. Van Dijk dengan teori resonansi sistem sosial Niklas Luhmann, sehingga tidak hanya mengungkap struktur teks, tetapi juga menjelaskan bagaimana makna komunikasi diproduksi melalui logika sistem sosial yang berbeda. Kedua, secara empiris, penelitian ini mengidentifikasi resonansi antara masyarakat dan pemerintah dalam wacana media lokal, yang belum banyak dibahas dalam studi komunikasi lingkungan sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas pendekatan analisis komunikasi lingkungan, tetapi juga menawarkan perspektif baru dalam memahami kegagalan koordinasi komunikasi antar sistem sosial dalam isu bencana.

Metode Penelitian dan Pendekatan Teori

Objek penelitian ini adalah pemberitaan mengenai isu penanggulangan banjir yang dipublikasikan oleh media massa lokal serta komunikasi yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat dalam kurun waktu 2020–2025. Penelitian ini tidak menempatkan media sebagai fokus utama kajian, melainkan sebagai ruang komunikasi yang memperlihatkan bagaimana sistem sosial, khususnya pemerintah dan masyarakat dalam membangun, merespons, dan mereproduksi isu penanggulangan banjir.

Media lokal dalam penelitian ini diperlakukan sebagai sumber data yang merekam dinamika komunikasi internal sistem sosial terkait upaya penanggulangan banjir. Oleh karena itu, penelitian tidak dibatasi pada satu media tertentu, melainkan menggunakan beberapa media massa lokal yang memuat pemberitaan mengenai respons pemerintah dan masyarakat terhadap permasalahan banjir. Pemilihan beberapa media dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai variasi dan pola komunikasi yang berkembang di ruang publik lokal.

Komunikasi Sistem Pemerintah dan Masyarakat di Media Lokal dalam Isu Penanggulangan Banjir di Kota Sungai Penuh

Penentuan media yang dianalisis tidak didasarkan pada kuantitas pemberitaan atau intensitas publikasi semata, tetapi pada prinsip kejenuhan data (data saturation). Prinsip ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh telah cukup merepresentasikan diferensiasi respons dari berbagai sistem sosial yang terlibat dalam isu penanggulangan banjir. Dengan demikian, pemilihan sumber media bertujuan untuk menangkap keragaman perspektif komunikasi yang muncul dalam pemberitaan, sehingga memungkinkan peneliti memahami bagaimana isu banjir dikonstruksi, ditafsirkan, dan direspons oleh berbagai aktor sosial dalam ruang komunikasi lokal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif konstruktif, dengan metode penelitian analisis wacana Teun A. Van Dijk yang melihat objek penelitian menjadi tiga, yaitu dimensi teks, kognisi sosial dan juga konteks sosial (Dijk, 1943). Dimensi teks berhubungan dengan struktur teks dalam media, kognisi sosial berhubungan dengan pandangan pihak yang membuat teks, sedangkan konteks sosial berhubungan situasi yang berkembang terkait isu atau wacana yang berkembang di masyarakat (Van Dijk, 2023; Van Dijk, 2009).

Setelah dilakukan analisis teks wacana Teun A. Van Dijk pada media masa, baru dilihat resonansi dari masing-masing sistem-sistem sesuai dengan pendekatan ekologi komunikasinya Niklas Luhmann (Luhmann, 1989). Dilihat apakah komunikasi masing-masing sistem di media massa seimbang, *to much* atau *to litte* terkait isu isu penanggulangan banjir di Kota Sungai Penuh.

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dan analisis dokumentasi, yang bertujuan agar mendapatkan data yang bersifat holistic terkait penelitian (Haryoko et al., 2020). Dalam hal keabsahan analisis, penelitian ini menggunakan triangulasi metode analisis dan sumber data penelitian, untuk menjamin adanya keandalan dan keabsahan data penelitian (Bachri, 2010)

Pembahasan dan Hasil

Analisis Teks Berita

Tabel 1. Respon Masyarakat di dalam Media

Tahun (Media)	Judul (Link)	Dimensi Teks	Kognisi sosial	Konteks Sosial
2020 (jambi.viralpublik.com)	Wako AJB Tindaklanjuti Aspirasi Warga, Normalisasi Sungai Bungkal & Revitalisasi Areal Persawahan Cangkin (https://jambi.viralpublik.com/wako-ajb-tindaklanjuti-aspirasi-warga-normalisasi-sungai-bungkal-revitalisasi-areal-persawahan)	Tulisan ini disusun dalam bentuk laporan naratif yang mengangkat tema kolaborasi masyarakat dan partisipasi pemerintah. Berita menyajikan struktur deskriptif (siapa, kapan, apa) dan mencantumkan kutipan harapan petani mengenai “normalisasi Sungai Bungkal” sebagai fokus utama. Istilah	Sudut pandang kombinasi: tulisan ini meletakkan pemerintah daerah dan pemimpin adat sebagai penyelenggara yang mendengarkan masyarakat petani. Narasi menyampaikan harapan Gapoktan dan pemimpin adat yang mendambakan segera dilakukan normalisasi	Konteksnya adalah genangan air di lahan pertanian di Kecamatan Cangkin disebabkan oleh hujan lebat. Sekitar 40 hektar dari 232 ha lahan pertanian petani terendam oleh banjir musiman. Kondisi sosial yang dihadapi adalah krisis pertanian

		<p>“gotong royong” dan “normalisasi sungai” menyoroti partisipasi masyarakat dan peningkatan infrastruktur</p>	<p>sungai. Pernyataan aspirasi petani (“Masyarakat berharap normalisasi...”) mencerminkan sudut pandang langsung warga dalam teks</p>	<p>(penurunan produksi padi) yang menyebabkan warga melakukan protes dan mendorong perbaikan sistem saluran air untuk solusi jangka panjang</p>
<p>2021 (radarjambi.co.id)</p>	<p>Al haris gotong-royong Bersama warga sekaligus resmikan Kawasan kampung perikanan (https://liputanta.njab.com/al-haris-gotong-royong-bersama-warga-sekaligus-resmikan-kawasan-kampung-perikanan/)</p>	<p>Teks disampaikan dalam bentuk siaran pers berita lokal dengan kutipan langsung dari pejabat senior. Pemakaian bahasa daerah (“samo-samo kito jago sungai”) dalam kutipan dari Gubernur memberikan kesan hangat dan meyakinkan. Struktur teks menyoroti kerja sama antara pemimpin dan masyarakat, dengan fokus utama pada ajakan untuk melestarikan sungai</p>	<p>Narasi menekankan perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat. Sudut pandang teks adalah pejabat publik yang aktif menanggapi harapan petani dan petani yang senang mendapat perhatian. Pandangan Gubernur mencerminkan semangat gotong royong Jawa (kolaboratif) dan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan</p>	<p>Latar belakang sosialnya berhubungan dengan penurunan hasil padi di Jambi serta berkurangnya area persawahan. Keadaan ini semakin parah akibat banjir lahan pertanian. Gubernur menyebutkan berkurangnya luas dan hasil sawah, menjelaskan bahwa banjir adalah ancaman bagi ketahanan pangan lokal, sehingga inisiatif gotong royong untuk membersihkan sungai dilakukan sebagai langkah mitigasi jangka panjang</p>

Komunikasi Sistem Pemerintah dan Masyarakat di Media Lokal dalam Isu Penanggulangan Banjir di Kota Sungai Penuh

2023 (jambi.viralpublik.com)	Bersama Dengan Masyarakat, Wako Ahmadi Ikut Gotong Royong Bersihkan Sungai (https://jambi.viralpublik.com/ber-sama-dengan-masyarakat-wako-ahmadi-ikut-gotong-royong-bersihkan-sungai)	Berita disusun secara naratif dengan penekanan pada aktivitas bakti sosial. Judul dan kutipan Walikota menyoroti kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah (“bersama masyarakat, Wako Ahmadi berpartisipasi dalam gotong royong”). Struktur teks mencakup pernyataan langsung dari Wali Kota, ungkapan terima kasih, dan rencana anggaran untuk pembangunan tanggul (2024) di bagian akhir. Laporan tersebut menekankan motif lingkungan (pembersihan sungai)	Wacana mencerminkan sudut pandang Wali Kota yang mendukung serta memotivasi masyarakat. Pernyataan beliau (“terima kasih atas keikutsertaan... gotong royong dalam menjaga lingkungan harus selalu didorong”) mencerminkan nilai-nilai kolektif komunitas yang telah terinternalisasi dalam pikiran pemerintah. Visi serta tanggung jawab sosial pemerintah tercermin dari penyaluran bantuan semen dan komitmen anggaran, menunjukkan pandangan pihak berwenang bahwa penanganan bencana adalah tanggung jawab bersama	Konteks sosialnya adalah bencana banjir tahunan yang disebabkan oleh hujan ekstrem, khususnya di Kecamatan Kumun Debai beberapa waktu lalu (tanggul jebol). Warga Sungai Penuh tinggal dalam situasi rentan terhadap banjir hulu sungai. Masalah yang diangkat adalah pentingnya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur (tanggul, normalisasi) guna meminimalkan risiko terjadinya banjir kembali
2025 (inBrita.com)	Warga Angkat Sampah dari Got, Ungkap Penyebab Banjir (https://inbrita.com/warga-angkat-sampah-dari-got-ungkap-penyebab-banjir/)	Berita santai berupa laporan kejadian singkat dengan gaya cerita yang umum: judul menarik mengaitkan tindakan masyarakat dengan penyebab	Penulis menempatkan masyarakat sebagai entitas yang aktif dan peduli terhadap lingkungan. Judul menyoroti partisipasi masyarakat (“Warga Angkat	Konteks: musim penghujan mengakibatkan sistem saluran tersumbat sampah, memicu banjir di jalan dan kawasan pemukiman. -

<p>banjir. Susunan: gambar ilustrasi (warga membersihkan saluran), paragraf pembuka singkat menjelaskan permasalahan, diikuti kutipan dialog dari tokoh (masyarakat). - Bahasa persuasif/edukatif (“Masyarakat harus mengerti...”) langsung dari sumber. - Menekankan tindakan pribadi (ibu rumah tangga) dan dampaknya, bukan laporan formal</p>	<p>Sampah...”). - Narasumber (ibu rumah tangga) berbicara dengan bahasa sehari-hari di video media sosial (“Lihat ini, banyak sekali sampahnya... bahaya”), mencerminkan sudut pandang masyarakat. - Kognisi muncul sebagai seruan moral: mengingatkan publik untuk tidak membuang sampah sembarangan (narasi “agar tidak membuang sampah ke selokan”)</p>	<p>Masalah sampah dan banjir sering diperbincangkan di Sungai Penuh; video yang viral di media sosial menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan. - Media menekankan ‘kepandaian lokal’ masyarakat sebagai respon mendesak terhadap minimnya perawatan saluran oleh otoritas</p>
---	--	---

Peliputan media mengenai banjir di Sungai Penuh antara 2020–2025 menunjukkan bahwa masyarakat merespon peanggulangan banjir dengan berbagai cara, mulai dari kerja bakti membersihkan sungai dan saluran air, keterlibatan langsung dalam normalisasi aliran sungai, hingga inisiatif secara mandiri seperti mengangkat sampah dari selokan agar alirannya tidak terhambat. Dari aspek dimensi teks, berita-berita itu disusun dengan pola yang seragam: menyoroti aktivitas nyata masyarakat, memberikan tempat bagi kutipan langsung individu atau tokoh setempat, serta menekankan istilah yang penuh makna kolektif seperti “gotong royong” atau “jaga sungai”. Terdapat juga variasi gaya, mulai dari laporan resmi yang menekankan pada fakta kerugian pertanian hingga narasi umum yang menyoroti suara sehari-hari masyarakat di media sosial.

Dalam perspektif kognisi sosial, media tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun representasi mengenai bagaimana masyarakat dipahami dan diposisikan dalam suatu isu publik. Dalam konteks pemberitaan banjir, media menggambarkan masyarakat sebagai entitas yang proaktif dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Petani menyuarkan harapan agar sungai segera diperbaiki karena banjir mengancam lahan pertanian mereka; warga desa menunjukkan solidaritas melalui kegiatan gotong royong membersihkan sungai bersama para pemimpin lokal; sementara seorang ibu rumah tangga dalam video viral mengingatkan masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Representasi ini menunjukkan bagaimana kesadaran kolektif, nilai kerja sama, serta kepedulian terhadap lingkungan terinternalisasi dan diekspresikan sebagai bagian dari identitas sosial masyarakat. Dalam studi komunikasi dan media, representasi semacam ini dipahami sebagai proses di mana media membingkai aktor sosial dan tindakan kolektif dalam

Komunikasi Sistem Pemerintah dan Masyarakat di Media Lokal dalam Isu Penanggulangan Banjir di Kota Sungai Penuh

struktur makna tertentu yang dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap isu lingkungan (Entman, 1993; Van Dijk, 2009)

Di sisi lain, konteks sosial yang melatarbelakangi wacana tersebut adalah situasi rawan banjir musiman yang terjadi secara berulang, kerugian signifikan di sektor pertanian akibat sawah yang terendam, penurunan produksi pangan lokal, serta persoalan struktural seperti saluran air yang tersumbat oleh sampah. Kondisi ini menunjukkan bahwa banjir tidak semata-mata merupakan fenomena alam, melainkan juga persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkaitan erat dengan praktik keseharian masyarakat. Penelitian mengenai komunikasi lingkungan dan partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa keterlibatan warga dalam upaya penanggulangan bencana sering muncul sebagai respons adaptif terhadap tekanan ekologis dan ekonomi yang mereka hadapi (Cox, 2023; O'Neill & Nicholson-Cole, 2009). Dalam situasi seperti ini, partisipasi masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai solusi praktis dalam menghadapi krisis lingkungan, tetapi juga menjadi narasi sosial yang menegaskan posisi masyarakat sebagai aktor utama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di wilayahnya (Chambers, 1997; Pretty, 1995)

Tabel 2. Respon Pemerintah di dalam Media

Tahun (Media)	Judul	Dimensi Teks	Kognisi sosial	Konteks Sosial
2020 (suara butesarko. com)	Reaksi Cepat Pemkot Sungai Penuh Bantu Korban Banjir (https://ppid.ke.mendagri.go.id/storage/dokumen/ueEctbSQeDgP9N3C5oc51IG6IAHlqZJMeK3vI2Dy.pdf)	Laporan berita dengan gaya faktual/informatif mengenai pelaksanaan penanggulangan bencana, disusun secara kronologis	Narator menunjukkan pemerintah yang tanggap dan perhatian; pemerintah tergambar cepat dan aktif dalam membantu para korban	Hujan deras pada 4–5 Juni 2020 menyebabkan banjir. Pemerintah lakukan Penanganan darurat terjadi di tengah pandemi COVID-19, bersamaan dengan persiapan bulan Ramadan
2021 (bnpb. go.id)	Banjir Rendam 70 Rumah Warga Kota Sungai Penuh (https://www.bnpb.go.id/berita/page/139)	Data resmi (website BNPB) dengan penjelasan singkat. Bahasa resmi yang jelas, menekankan fakta tentang banjir dan tindakan bantuan	Pandangan pemerintah/BNPB menekankan pentingnya kewaspadaan. Narator berperan sebagai otoritas, menyerukan	Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi pada Desember 2021. Pemerintah menyarankan Penduduk untuk

			kolaborasi dan pembersihan saluran untuk menghindari banjir yang berkepanjangan	berhati-hati; masalah kebersihan sungai dan kewaspadaan menjadi perhatian utama
2022 (bpiw.pu.go.id)	Kunjungi BPIW, Walikota Sungai Penuh Sampaikan Kebutuhan Prioritas Infrastruktur PUPR (https://bpiw.pu.go.id/berita/kunjungi-bpiw-walikota-sungai-penuh-sampaikan-kebutuhan-prioritas-infrastruktur-pupr)	Berita profil kementerian/PUPR dengan kutipan wawancara; gaya ekspositori. Menggunakan pernyataan langsung Walikota.	Pemerintah daerah proaktif mencari solusi jangka panjang. Walikota menekankan urgensi pengendalian banjir, menampilkan diri sebagai advokat infrastruktur.	Banjir kerap melanda akibat lekukan alami Sungai Batang Merao. Warga dan Pemerintah Daerah mengharapkan bantuan dari pusat untuk pengembangan infrastruktur pencegahan banjir
2023 (ppid.sungai.penuhkota.go.id)	Wako Ahmadi Tinjau Dampak Banjir Bandang Kecamatan Kumun Debai.	Laporan resmi humas pemerintah kota (ringkasan berita beserta gambar). Teksnya bersifat naratif, menggabungkan deskripsi aktivitas dan kutipan inspiratif dari Walikota	Wali Kota muncul sebagai sosok pemimpin yang arif; memberikan semangat kepada masyarakat yang terdampak (“bersabar, mengambil pelajaran”) sekaligus menegaskan tekad pemerintah untuk	Banjir melanda pada Hardiknas 2023 (22 Maret) – menjadi sorotan karena upacara berlangsung di tengah banjir. Pemerintah berusaha mengatasi kekhawatiran masyarakat melalui

Komunikasi Sistem Pemerintah dan Masyarakat di Media Lokal dalam Isu Penanggulangan Banjir di Kota Sungai Penuh

			menganalisis perbaikan sungai	penanganan cepat dan jaminan solusi jangka panjang (normalisasi sungai)
2024 (ppid.sungai penuhkota.go. id)	Banjir Bandang Dan Tanah Longsor Di Beberapa Desa Di Dalam Wilayah Kota Sungai Penuh 10 Juni 2024	Laporan media resmi/lokal (kombinasi humas Pemkot dan berita daring). Tulisan deskriptif dan kutipan langsung dari Walikota; bersifat komunikatif dan tegas	Pemerintah menunjukkan ketanggapan dan itikad baik: "terus berusaha mengatasi" banjir. Narasi mengutamakan dukungan serta rencana tindakan, menampilkan sosok Walikota sebagai tokoh yang melindungi masyarakat	Banjir kembali terjadi di awal 2024 setelah curah hujan yang ekstrem pada akhir 2023. Diskusi publik menekankan pentingnya solusi struktural yang berkelanjutan; pemerintah berusaha menyesuaikan respons darurat dengan janji kebijakan normalisasi
2025 (ppid.sungai penuhkota.go. id)	Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025 Pemerintah Kota Sungai Penuh	Laporan internal pemerintah (Renja BPBD) merupakan ringkasan dari pencapaian. Gaya tabel/statistik resmi, mengintegrasikan data insiden dan pencapaian bantuan	Perspektif birokratik terukur: berfokus pada angka kejadian dan bantuan material. Narasi menekankan tanggung jawab pemda dalam	Kelanjutan risiko banjir tahunan awal 2025 mendorong pemerintah daerah untuk memusatkan perhatian pada penanganan bantuan

distribusi bantuan material	korban. Konteksnya adalah jadwal rutin mitigasi dan pencatatan performa BPBD terkait bencana yang terjadi berulang.
-----------------------------------	---

Berita media massa dan media pemerintah daerah menunjukkan bahwa pemerintah Kota Sungai Penuh secara berkelanjutan menangani banjir dengan strategi darurat dan juga langkah-langkah jangka panjang. Dalam aspek dimensi teks, media lokal dan saluran resmi pemerintah menyajikan laporan dalam format faktual serta deskriptif, disertai dengan kronologi, kutipan langsung dari Walikota, serta laporan statistik. Berita tahun 2020–2021 lebih singkat dan fokus pada tindakan cepat seperti evakuasi serta distribusi bantuan, sementara narasi tahun 2022–2024 lebih ekspositori, memperlihatkan Walikota sebagai sosok yang mengemukakan solusi struktural seperti normalisasi sungai dan pembuatan infrastruktur. Pada tahun 2025, format teks beralih ke gaya birokratik melalui dokumen Renja, yang menekankan data pencapaian dan distribusi bantuan material.

Dari perspektif kognisi sosial, pemerintah dalam pemberitaan diposisikan sebagai aktor utama yang responsif, memiliki perhatian terhadap masyarakat, serta dipandang memiliki kapasitas pengetahuan dalam menangani persoalan banjir. Narasi yang berkembang menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya digambarkan sebagai pihak yang hadir dalam situasi darurat, tetapi juga sebagai pengambil keputusan yang berupaya merumuskan solusi jangka panjang terhadap persoalan banjir. Dalam beberapa pemberitaan, wali kota direpresentasikan sebagai figur kepemimpinan yang bijaksana yang memberikan dorongan moral kepada masyarakat sekaligus berperan sebagai advokat pembangunan infrastruktur kepada pemerintah pusat. Representasi tersebut menunjukkan adanya upaya konstruksi citra pemerintah sebagai institusi yang berwibawa, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam kajian komunikasi politik dan media, pembentukan citra institusional melalui narasi pemberitaan merupakan praktik yang umum terjadi, di mana media berperan dalam membingkai aktor pemerintah sebagai agen solusi dalam situasi krisis (Entman, 1993; Van Dijk, 2006).

Dalam konteks sosial yang lebih luas, respons pemerintah tersebut berlangsung di tengah kondisi banjir tahunan yang terus berulang dan diperparah oleh intensitas curah hujan yang tinggi, kerentanan sektor pertanian, serta keterbatasan sistem drainase perkotaan. Literatur mengenai komunikasi risiko bencana menunjukkan bahwa pemerintah sering menjadi pusat ekspektasi publik dalam situasi krisis lingkungan karena memiliki legitimasi institusional dan sumber daya kebijakan untuk merespons bencana (Houston et al., 2015; Seeger, 2006). Pada tahun 2020, penanganan banjir berlangsung dalam situasi yang semakin kompleks karena bersamaan dengan pandemi COVID-19, yang menambah tekanan sosial dan ekonomi masyarakat. Studi tentang komunikasi krisis menunjukkan bahwa kondisi multi-krisis seperti pandemi dan bencana alam secara simultan meningkatkan tuntutan terhadap pemerintah untuk menyampaikan informasi yang jelas sekaligus menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang meyakinkan (Sellnow & Seeger, 2013).

Pada periode 2021–2023, diskursus mengenai banjir dalam ruang publik semakin dikaitkan dengan isu ketahanan pangan akibat penurunan produksi pertanian serta meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap keberlanjutan mata pencaharian. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian mengenai dampak banjir terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan di berbagai wilayah Asia Tenggara (Alderman et al., 2012; Hirabayashi,

Komunikasi Sistem Pemerintah dan Masyarakat di Media Lokal dalam Isu Penanggulangan Banjir di Kota Sungai Penuh

2021). Memasuki periode 2024–2025, diskusi publik semakin menyoroti pentingnya normalisasi aliran sungai, pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, serta perencanaan mitigasi berbasis kebijakan jangka panjang. Dalam konteks ini, pemerintah berupaya menyeimbangkan tindakan respons darurat dengan upaya perencanaan kebijakan yang lebih struktural dan berkelanjutan, sebuah pendekatan yang dalam literatur manajemen bencana dipandang sebagai strategi penting untuk mengurangi risiko bencana jangka panjang (Tierney, 2014; UNDRR, 2019).

Analisis Resonansi Sistem Masyarakat dan Pemerintah

Resonansi Niklas Luhman tidak berupaya menyelesaikan masalah lingkungan, melainkan membantu kita melihat realitas lingkungan yang direduksi dalam komunikasi internal sistem sosial, sehingga bisa memberi pemahaman mengenai dinamika sosial yang ada di masyarakat (Baraldi & Corsi, 2017).

Dalam analisis resonansi, penelitian ini hanya fokus pada seleksi respon yang dilakukan oleh sistem masyarakat dan pemerintah di dalam teks media lokal mengenai isu banjir. Sehingga, komunikasi yang dilakukan diluar media tidak menjadi fokus di dalam penelitian ini.

Melalui pendekatan resonansi komunikasi ekologis Niklas Luhmann, respons sistem komunitas Sungai Penuh terhadap masalah banjir pada periode 2020–2025 menunjukkan resonansi yang cenderung "berlebihan" tetapi belum seimbang.

Hal ini dapat dilihat dari cara masyarakat secara aktif menanggapi masalah banjir melalui berbagai bentuk komunikasi dan tindakan, mulai dari protes atas sawah yang tergenang banjir, upaya masyarakat untuk membersihkan sungai, hingga inisiatif pribadi untuk membersihkan sampah dari saluran drainase. Resonansi "berlebihan" tampak jelas karena hampir setiap musim hujan masalah ini muncul kembali di media dan ruang publik, memicu reaksi emosional dan moral serta tindakan langsung. Dengan kata lain, sistem sosial terus-menerus "bergetar" dan beresonansi dengan masalah lingkungan ini.

Namun, resonansi ini belum dapat dianggap seimbang, karena partisipasi masyarakat seringkali muncul sebagai reaksi sementara dan kebetulan, bukan sebagai hasil dari sistem komunikasi yang konsisten dan berkelanjutan. Respons masyarakat lebih kuat dalam bentuk protes, kritik, atau tindakan mendadak, sementara aspek struktural seperti pengelolaan saluran sungai, pembangunan bendungan, dan kebijakan lingkungan belum sepenuhnya merespons dengan kecepatan yang sebanding.

Dalam dimensi teks, media menyoroti sistem masyarakat dengan tindakan praktis dan nyata mulai dari inisiatif mandiri, membersihkan sungai, hingga upaya normalisasi sungai secara manual. Intensitas komunikasi masyarakat di dalam media juga tergolong tinggi dengan ekspresi berbagai istilah dominan seperti : inisiatif masyarakat, menjaga sungai, dan gotong royong. Masyarakat digambarkan reflektif, peduli dan sadar akan ancaman lingkungan berupa banjir karena mempengaruhi aktifitas kehidupan, terutama pertanian dan ketahanan pangan.

Temuan ini sejalan dengan studi (Andreastuti et al., 2019; Drury & Ntontis, 2025; Yokouchi, 2015) menunjukkan media telah menjadikan identitas kolektif masyarakat sebagai penjaga sungai terbentuk sebagai sistem utama dalam mitigas bencana, menunjukkan bahwa iritasi terhadap kompleksitas lingkungan telah dimaknai secara sosial.

Resonansi masyarakat memiliki kapasitas yang terlalu besar, dikarenakan sangat intensi, bersifat reaktif, dan berulang. Resonansi yang terlalu besar menyebabkan adanya dampak normalisasi bahwa permasalahan banjir hanyalah tanggung jawab masyarakat saja, sehingga berpotensi kelelahan sosial dan adaptasi yang tak seimbang. Studi-studi komunikasi sistemik ala Luhman seperti (Dubé, 2017; Gonnet, 2018) menjelaskan analisis yang terlalu besar bukan berarti baik maupun buruk, melainkan melampaui batas stabilitas sistem sosial masyarakat secara internal.

Ketika dianalisis menggunakan pendekatan resonansi komunikasi ekologis Niklas Luhmann, respons sistem pemerintahan Kota Sungai Penuh terhadap masalah banjir menunjukkan pola resonansi yang cenderung terlalu kecil meskipun terorganisir. Antara tahun 2020 dan 2025, pemerintah terus terlibat dalam komunikasi publik melalui laporan resmi,

siaran pers, dan dokumen perencanaan. Narasi selalu menyoroti ketahanan, kepedulian, dan upaya berkelanjutan. Wali kota digambarkan sebagai sosok yang bijaksana dan responsif yang juga merupakan tokoh sentral dalam memperoleh dukungan infrastruktur. Dalam hal komunikasi, resonansi pemerintah cukup konstan muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari laporan singkat selama keadaan darurat, penjelasan ketika membahas rencana normalisasi sungai, hingga gaya birokrasi dalam dokumen Rencana Kerja. Dengan kata lain, sistem pemerintahan berdegung secara resmi dan teratur.

Namun, jika dibandingkan dengan frekuensi dan intensitas resonansi publik, resonansi pemerintah tampak lebih rendah. Respons pemerintah lebih terencana, terstruktur, dan administratif. Jarang menunjukkan intensitas emosional atau ledakan komunikasi spontan seperti yang terlihat dalam respons publik. Dengan kata lain, resonansi pemerintah terlalu kecil dalam arti intensitas emosionalnya rendah, meskipun posisinya tetap stabil dan berulang. Komunikasi pemerintah seringkali lebih fokus pada citra dan manajemen (seperti data korban, bantuan, rencana infrastruktur), sehingga dampaknya terasa resmi dan agak lambat untuk menangkap reaksi emosional masyarakat yang muncul setiap kali terjadi banjir.

Dalam konteks ekologi komunikasi, ini menunjukkan bahwa pemerintah berada dalam resonansi parsial. Dalam teks media yang dianalisis, pada dasarnya pemerintah mendengar gema masalah banjir, tetapi tidak sepenuhnya menyelaraskan frekuensinya dengan intensitas masyarakat. Resonansi yang rendah ini membuat pemerintah tampak hadir, tetapi tidak cukup kuat untuk membangun keseimbangan komunikasi antara sistem masyarakat dan sistem politik pemerintah. Pemerintah hadir hanya secara administratif dan simbolik sebagai bentuk dari kinerja dan pembangunan

Dalam teks media, resonansi sistem pemerintah bersifat birokratis, kronologis dan factual. Sejalan dengan penelitian berupa (Davlasheridze & Miao, 2021; Ingargiola & Perotin, 2013; McCarthy & Brown, 2014; Miao & Davlasheridze, 2025; Saini et al., 2024) pembangunan infrastruktur, pemberian bantuan, evakuasi korban, dan mendata pencapaian mitigasi sebagai bagian dari kinerja. Menurut studi (Canel & Sanders, 2016; Greitens & Joaquin, 2012; MARTÍNEZ GUZMAN, 2020; Ranta, 2011) mayoritas komunikasi pemerintah bersifat administratif dan top down difilterasi oleh kode regulasi berupa program, anggaran, dan laporan kinerja. Sedangkan menurut studi (Andreastuti et al., 2019; Ramadhan & Sunarharum, 2025) pemahaman pemerintah mengenai mitigasi pemerintah digambarkan tidak sepenuhnya berasal dari pengalaman masyarakat sehari-hari dalam menghadapi masalah lingkungan.

Sistem pemerintah mengamati kompleksitas lingkungan agar tidak mengganggu stabilitas internal sistem. Pemerintah hanya merespon banjir sebagai bentuk bencana tahunan, tekanan publik, dan penurunan produksi pangan. Ritme komunikasi krisis pemerintah juga masih lamban dalam penanganan, karena masih terhambat mekanisme dan adaptasi strukturalnya sendiri yang masih kaku dan administratif, sehingga berdampak pada kapasitas resonansi yang terlalu kecil.

Terbatasnya resonansi pemerintah sejalan dengan studi (Handoyo, 2024; Ruan et al., 2022) yang menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi dan kebijakan pemerintah yang rendah akan berdampak pada stabilitas, legitimasi dan tatakelola lingkungan yang tidak stabil dan lamban.

Dalam konteks teori resonansi Niklas Luhmann, situasi ini menunjukkan bahwa sistem sosial hanya akan merespons gangguan dari lingkungan sejauh komunikasi yang berkelanjutan dianggap bermakna (Luhmann, 1989). Banjir segera menjadi perhatian masyarakat karena secara langsung mengancam kehidupan sehari-hari dan mata pencaharian. Bagi pemerintah, resonansi terjadi tetapi diproses melalui logika birokrasi, sehingga lebih lambat dan lebih formal. Hasil ini mendukung teori Luhmann bahwa resonansi antar subsistem selalu asimetris: setiap subsistem beresonansi dengan kode komunikasinya sendiri (Barnett, 2008; Bulcsu, 2012; Mohe & Seidl, 2011).

Resonansi yang tidak seimbang antara masyarakat dan pemerintah membuat banjir selalu tertangani, tetapi mudah kembali karena tidak mengubah kondisi tetapi hanya mencoba pengolah dampak. Teks media menonjolkan gotong royong masyarakat membuat pemerintah seperti gagal dalam membuat kebijakan secara struktural. Pemerintah sangat tergantung

Komunikasi Sistem Pemerintah dan Masyarakat di Media Lokal dalam Isu Penanggulangan Banjir di Kota Sungai Penuh

pada kapasitas masyarakat, berdampak pada perlemahan tata kelola lingkungan. Resonansi yang tidak seimbang membuat banjir dikelola secara tidak transformatif dan beradaptasi pada kondisi lingkungan dan fungsional internal sistem sosial. Ketidakseimbangan resonansi membuat sistem yang ada berpotensi gagal dalam mereduksi permasalahan lingkungan dan membuat mitigasi resiko bencana menjadi tidak terkelola dan dipresiksi dengan baik.

Penelitian seperti (Salley et al., 2025; Setiadi et al., 2023) menekankan bahwa komunikasi penanggulangan banjir bergerak dari pola top-down menuju partisipatif. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat meningkat, hal tersebut tidak serta-merta menghasilkan komunikasi yang seimbang, karena resonansi masyarakat justru menjadi terlalu dominan dibandingkan pemerintah. Sementara itu, studi (Lin, 2025) menekankan pentingnya komunikasi kolaboratif dalam meningkatkan efektivitas mitigasi, tetapi temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan utama bukan hanya pada kurangnya kolaborasi, melainkan pada perbedaan logika komunikasi antar sistem sosial yang menyebabkan ketidaksinkronan respons. Dengan demikian, penelitian ini memperluas temuan sebelumnya dengan menunjukkan bahwa persoalan komunikasi banjir tidak hanya terletak pada media atau strategi, tetapi pada ketidakseimbangan struktural dalam resonansi sistem sosial.

Secara teoritis, temuan ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan resonansi bukan sekadar perbedaan intensitas komunikasi, tetapi mencerminkan mekanisme autopoiesis sistem sosial sebagaimana dijelaskan oleh Luhmann. Sistem masyarakat beroperasi dengan logika pengalaman langsung dan kedekatan terhadap risiko, sehingga menghasilkan komunikasi yang cepat, emosional, dan berulang. Sebaliknya, sistem pemerintahan beroperasi melalui logika birokrasi dan regulasi, yang menuntut stabilitas, prosedur, dan akuntabilitas, sehingga menghasilkan komunikasi yang lebih lambat dan terstruktur.

Perbedaan logika ini menyebabkan ketidakmungkinan terciptanya resonansi yang sepenuhnya simetris, karena masing-masing sistem hanya dapat merespons berdasarkan kode internalnya. Dalam konteks ini, media tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi sebagai ruang observasi kedua (second-order observation) yang memperlihatkan bagaimana masing-masing sistem mengkonstruksi realitas banjir secara berbeda. Implikasinya, kegagalan dalam penanggulangan banjir tidak dapat semata-mata dipahami sebagai kegagalan kebijakan atau partisipasi, tetapi sebagai konsekuensi dari ketidaksinkronan komunikasi antar sistem sosial yang secara struktural tidak dapat sepenuhnya disatukan.

Penutup

Analisis resonansi sistem sosial terkait masalah pengelolaan banjir di Kota Sungai Penuh menunjukkan ketidakseimbangan antara resonansi masyarakat dan pemerintah. Masyarakat merespons dengan "terlalu banyak" karena mereka menganggap banjir sebagai ancaman langsung terhadap kehidupan dan mata pencaharian sehari-hari mereka, yang berarti mereka mendominasi peran tersebut, sementara pemerintah cenderung merespons dengan "terlalu sedikit" secara birokratis dan konsisten, tetapi dengan intensitas dan partisipasi yang lebih rendah.

Dalam teori resonansi Niklas Luhmann, temuan ini menegaskan bahwa setiap subsistem sosial (masyarakat dan pemerintah) hanya beresonansi sesuai dengan logika komunikasinya sendiri, sehingga resonansi yang terjadi tidak pernah seimbang. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan komunikasi gagal menciptakan solusi bersama yang berkelanjutan.

Sesuai dengan kerangka teori komunikasi lingkungan Niklas Luhmann, Penelitian ini tidak akan memberikan saran normatif mengenai komunikasi terbaik yang harus dilakukan masyarakat dan pemerintah. Penelitian ini bisa menjadi rujukan bagaimana kita melihat cara masyarakat dan pemerintah berkomunikasi mengenai kompleksitas lingkungan terutama masalah banjir.

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan studi komunikasi lingkungan dengan menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi tidak hanya ditentukan oleh media atau partisipasi, tetapi oleh resonansi antar sistem sosial. Perspektif ini membuka ruang bagi pendekatan baru dalam kajian komunikasi bencana yang lebih menekankan pada dinamika sistemik dibandingkan pendekatan instrumental.

Daftar Pustaka

- Alderman, K., Turner, L. R., & Tong, S. (2012). Floods and human health: A systematic review. *Environment International*, 47, 37–47.
- Andreastuti, S., Paripurno, E., Gunawan, H., Budianto, A., Syahbana, D., & Pallister, J. (2019). Character of community response to volcanic crises at Sinabung and Kelud volcanoes. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 382, 298–310. <https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2017.01.022>
- Bachri, B. (2010). Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif. *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*, 10(1), 46–62. <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf>
- Baraldi, C., & Corsi, G. (2017). Reception and Legacy. In *SpringerBriefs on Key Thinkers in Education* (pp. 103–111). https://doi.org/10.1007/978-3-319-49975-8_7
- Barnett, A. (2008). A better world through law? The implications of the theories of Niklas Luhmann for green economics. *International Journal of Green Economics*, 2(4), 343. <https://doi.org/10.1504/IJGE.2008.022445>
- BPBD Kota Sungai Penuh. (2022). *Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026*. BPBD Kota Sungai Penuh. <https://ppid.sungaipeuhkota.go.id/storage/dokumen/ExHFi8tkggVYaNvyrOxJNgx6yEsS0TV1y3RshSmQ.pdf>
- Bulcsu, B. (2012). A modern társadalom funkcionális részrendszereinek egymáshoz fűződő viszonya – A horizontális és vertikális kapcsolatok dinamikája. *Szociológiai Szemle*, 22(3), 4–21. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84924149560&partnerID=40&md5=f3212648bd24aa32472c65ee7205a948>
- Canel, M. J., & Sanders, K. B. (2016). Government Communication. In *The International Encyclopedia of Political Communication* (pp. 1–8). <https://doi.org/10.1002/9781118541555.wbiepc190>
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. Intermediate Technology Publications.
- Cox, R. (2023). *Environmental Communication and the Public Sphere* (Vol. 18, Issue 10). Sage.
- Davlasheridze, M., & Miao, Q. (2021). Does post-disaster aid promote community resilience? Evidence from federal disaster programs. *Natural Hazards*, 109(1), 63–88. <https://doi.org/10.1007/s11069-021-04826-2>
- Dijk, T. A. van. (1943). *News as discourse*. Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.
- Drury, J., & Ntontis, E. (2025). A SOCIAL IDENTITY MODEL OF COLLECTIVE RESILIENCE IN EMERGENT GROUPS. In *The Power of Collective Resilience Against Political Violence and Repression* (pp. 13–30). <https://doi.org/10.4324/9781032708492-3>
- Dubé, R. (2017). Niklas luhmann and the empirical observation of the law: Communication, function, code, aram. *Droit et Societe*, 96(2), 381–399. <https://doi.org/10.3917/drs.096.0381>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Esposito, E., Sold, K., & Zimmermann, B. (2021). Systems theory and algorithmic futures: Interview with Elena Esposito. *Constructivist Foundations*, 16(3), 356–361. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85112766857&partnerID=40&md5=f928b9057ae3117b63f469709d8334d6>
- Fekete, A., & Rhein, B. (2024). More Help Was Offered—But Was It Effective? First Responders and Volunteers in the 2021 Flood Disaster in Germany. *Geosciences*, 14(2), 46. <https://doi.org/10.3390/geosciences14020046>

Komunikasi Sistem Pemerintah dan Masyarakat di Media Lokal dalam Isu Penanggulangan Banjir di Kota Sungai Penuh

- Gonnet, J. P. (2018). Conflict and social order in Niklas Luhmann's systems theory. *Cinta de Moebio*, 61, 110–122. <https://doi.org/10.4067/S0717-554X2018000100110>
- Greitens, T. J., & Joaquin, M. E. (2012). Perceptions of performance in US financial regulatory programs. *International Journal of Public Sector Management*, 25(6), 444–454. <https://doi.org/10.1108/09513551211260621>
- Handoyo, S. (2024). Public governance and national environmental performance nexus: Evidence from cross-country studies. *Heliyon*, 10(23), e40637. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e40637>
- Harahap, F. R., Herza, & Ilmi, R. (2023). PERAN MEDIA MASSA DAN UPAYA MITIGASI BANJIR ROB DI PANTAI PASIR PADI KOTA PANGKALPINANG. *PROCEEDINGS OF NATIONAL COLLOQUIUM RESEARCH AND COMMUNITY SERVICE*, 7, 74–78. <https://journal.ubb.ac.id/index.php/snppm/article/view/4833>
- Haryoko, S., Bahartiar, D., & Arwadi, F. (2020). *ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar. [https://eprints.unm.ac.id/20838/1/buku Sapto METODOLOGI.pdf](https://eprints.unm.ac.id/20838/1/buku%20Sapto%20METODOLOGI.pdf)
- Hayati, H., Wirda, W., & Mauvizar, E. (2024). Pengaruh Media Sosial dalam Peningkatan Kesiapsiagaan dan Respon Bencana pada Mahasiswa. *J-PIPS (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial)*, 11(1), 41–53. <https://doi.org/10.18860/jpips.v11i1.31319>
- Hirabayashi, Y. (2021). Global exposure to flooding from climate change. *Nature Climate Change*, 11, 528–535.
- Houston, J. B., Hawthorne, J., Perreault, M. F., Park, E. H., Hode, M. G., Halliwell, M. R., & Griffith, S. A. (2015). Social media and disasters: A functional framework for social media use in disaster planning, response, and research. *Disasters*, 39(1), 1–22.
- Ingargiola, J., & Perotin, M. (2013). FEMA mitigation assessment team program. *Forensic Engineering 2012: Gateway to a Better Tomorrow - Proceedings of the 6th Congress on Forensic Engineering*, 428–437. <https://doi.org/10.1061/9780784412640.046>
- Lin, C. A. (2025). Participatory Flood Risk Management and Environmental Sustainability: The Role of Communication Engagement, Severity Beliefs, Mitigation Barriers, and Social Efficacy. *Sustainability*, 17(7), 2844. <https://doi.org/10.3390/su17072844>
- Luhmann, N. (1986). The Autopoiesis of Social Systems. *Sage : Sociocybernetics Paradoxe*, In F. Geyger, J. van der Zowen (Eds.), *Sociocybernetics Paradoxe*, 172–192.
- Luhmann, N. (1989). *Ecological communication*. University of Chicago Press.
- MARTÍNEZ GUZMÁN, J. P. (2020). The Use of Performance Information Under Performance Budgeting Systems: A Comparative Analysis of Chilean Line Ministries. *International Public Management Journal*, 23(4), 591–610. <https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1486344>
- McCarthy, F. X., & Brown, J. T. (2014). Congressional primer on responding to major disasters and emergencies. In *Federal Support for Domestic Disaster Assistance: Deployable Assets and Responders* (pp. 75–90). <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84954422978&partnerID=40&md5=fdddba8d4bb825fdd248c65ffb4faee2>
- Miao, Q., & Davlasheridze, M. (2025). Estimating the loss-reduction effects of disaster preparedness and mitigation: An empirical study of US coastal states. *Risk Analysis*, 45(2), 307–321. <https://doi.org/10.1111/risa.16111>
- Moeller, H. (2017). Luhmann, Niklas. In *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory* (pp. 1–3). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118430873.est0219>
- Mohe, M., & Seidl, D. (2011). Theorizing the client—consultant relationship from the perspective of social-systems theory. *Organization*, 18(1), 3–22. <https://doi.org/10.1177/1350508409353834>
- Nadira, A., & Nur, H. (2024). KAJIAN KARAKTERISTIK BANJIR DAN PENANGANANNYA DI KOTA SUNGAI PENUH. *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Civil and Planning Engineering, Bung Hatta University*, 2(3).
- O'Neill, S., & Nicholson-Cole, S. (2009). "Fear Won't Do It." *Science Communication*, 30(3), 355–379. <https://doi.org/10.1177/1075547008329201>
- Pretty, J. (1995). The many interpretations of participation. *Focus*, 16, 4–5.
- Ramadhan, A. V., & Sunarharum, T. M. (2025). Community Understanding in Responding to

- Floods in Lake Sipin Periphery (Legok, Jambi City). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1443(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1443/1/012017>
- Ranta, A. E. (2011). The communication of local public authorities with mass-media. Effects and best practices. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, 34, 201–216. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-80955128683&partnerID=40&md5=8537eb4c50fda0aacdc463432d1677ef>
- Riskyani, M. A., Ramadhan, M. A., & Fajri, M. R. (2025). Analysis of The Impact of Flood on Residential Building Damage in Rawang Spread District, Sungai Penuh City, Jambi. *Sinektika: Jurnal Arsitektur*, 164–171. <https://doi.org/10.23917/sinektika.v22i2.4910>
- Roth, S., Sales, A., & de Vasconcelos Guedes, T. S. (2025). Environments: Observed With Social Systems Theory. An Introduction. *Systems Research and Behavioral Science*, 42(2), 263–269. <https://doi.org/10.1002/sres.3148>
- Ruan, H., Qiu, L., Chen, J., Liu, S., & Ma, Z. (2022). Government Trust, Environmental Pollution Perception, and Environmental Governance Satisfaction. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(16), 9929. <https://doi.org/10.3390/ijerph19169929>
- Saini, N., Jindal, R., & Shekhawat, U. (2024). India's disaster management system: Rehabilitation, recovery, and reconstruction. In *Disaster Human Crisis: Emergency, Response and Recovery* (pp. 209–234). <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85209598889&partnerID=40&md5=872696d0e8fa5436828d429f12892148>
- Salley, C., Fox, N., & Schubert, A. (2025). Bridging the gap in flood risk communication: a comparative study of community and organizational social media posts using natural language processing. *Frontiers in Communication*, 10. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1553746>
- Saputra, M. R., & Hidayat, F. (2025). Dinamika Komunikasi Persuasif dalam Media Massa: Teknik, Strategi, dan Pengaruh terhadap Perilaku Masyarakat. *Jurnal Al Nahyan*, 2(1), 62–73. <https://doi.org/10.58326/jan.v2i1.152>
- Seeger, M. W. (2006). Best practices in crisis communication: An expert panel process. *Journal of Applied Communication Research*, 34(3), 232–244.
- Sellnow, T. L., & Seeger, M. W. (2013). *Theorizing crisis communication*. Wiley-Blackwell.
- Setiadi, S., Sumaryana, A., Bekti, H., & Sukarno, D. (2023). Public Policy Communication for Flood Management. *The Journal of Society and Media*, 7(2), 300–312. <https://doi.org/10.26740/jsm.v7n2.p300-312>
- Tierney, K. (2014). *The social roots of risk: Producing disasters, promoting resilience*. Stanford University Press.
- UNDRR. (2019). *Global assessment report on disaster risk reduction*. United Nations Office for Disaster Risk Reduction.
- Valentinov, V. (2014). The complexity-sustainability trade-off in Niklas Luhmann's social systems theory. *Systems Research and Behavioral Science*, 31(1), 14–22. <https://doi.org/10.1002/sres.2146>
- van Dijk, T. A. (2023). SOCIAL MOVEMENT DISCOURSE: An Introduction. In *Social Movement Discourse: An Introduction*. <https://doi.org/10.4324/9781003455486>
- Van Dijk, T. A. (2006). Discourse and manipulation. *Discourse & Society*, 17(3), 359–383.
- Van Dijk, T. A. (2009). Society and discourse: How social contexts influence text and talk. In *Society and Discourse: How Social Contexts Influence Text and Talk*. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511575273>
- Yetty, S., Edial, H., & Triyatno. (2018). Pemetaan Wilayah Bahaya Banjir DI Kota Sungai Penuh. *Jurnal Buana*, 2(4), 383–391.
- Yokouchi, H. (2015). Proposal and practice of comprehensive disaster mitigation depending on communities in preservation districts for traditional buildings. *Journal of Disaster Research*, 10(5), 857–873. <https://doi.org/10.20965/jdr.2015.p0857>